



Pemkab Pasuruan Kembali Sampaikan Pandangan Terhadap Fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Pembahasan Rancangan APBD TA 2022



Selasa, 2 November 2021

Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, kembali menyampaikan pandangannya terhadap fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan dalam rangka Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022. Pandangan ini merupakan tanggapan terhadap

pertanyaan dan pernyataan beberapa fraksi dalam rapat paripurna sebelumnya.

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah soal SOTK dalam Raperda APBD tahun anggaran 2022 yang masih menggunakan SOTK lama. Wakil Bupati menekankan perlunya penyesuaian sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2021. Ia juga menyampaikan upaya dalam peningkatan PAD Tahun Anggaran 2021 dan optimis untuk mengoptimalkan peningkatan PAD pada Tahun Anggaran 2022.

Mengenai rencana defisit dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022, Wakil Bupati menjelaskan bahwa defisit akan ditutup dan dibiayai melalui optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Terkait dengan pandangan fraksi PDI Perjuangan mengenai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan, Wakil Bupati menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengikuti program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat. Program ini diprioritaskan dalam pemberian bantuan dan jaminan sosial melalui APBD 2022. Langkah yang diambil meliputi pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan akses modal, pasar, pelatihan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi desa.

Terakhir, terkait penanganan kasus stunting di Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti dengan menyusun Perencanaan, Pelaksanaan, serta Kolaborasi yang terintegrasi untuk menurunkan kasus Stunting di Kabupaten Pasuruan. Kasus stunting ini akan menjadi prioritas sesuai dengan delapan Aksi Integrasi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.